

2008

Pemilihan Umum di Jepang (Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II)

Sembiring, Serli Evantina

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14212>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

***PEMILIHAN UMUM DI JEPANG
(SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA II)***

***NIHON NO SOUSENKYO
(DAI NI JI SEKAI TAISEN NO MAE TO DAI NI JI SEKAI NO ATO)***

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara Medan
untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana dalam Bidang Ilmu Sastra
Jepang

Oleh:

SERLI EVANTINA SEMBIRING

NIM. 030 708 028



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS SASTRA
PROGRAM STUDI S-1 SASTRA JEPANG
MEDAN
2008**

**PEMILIHAN UMUM DI JEPANG
(SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA II)**

*NIHON NO SOUSENKYO
(DAI NI JI SEKAI TAISEN NO MAE TO DAI JI SEKAI TAISEN NO ATO)*

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara Medan
untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana dalam Bidang Ilmu Sastra
Jepang

PEMBIMBING I,

Drs. Amin Sihombing

N I P. 131945676

PEMBIMBING II,

Drs. Eman Kusdiyana,

N I P. 131763365



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS SASTRA
PROGRAM STUDI S-1 SASTRA JEPANG
MEDAN
2008**

Disetujui Oleh:
Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara
Medan

Program Studi S-1 Sastra Jepang

Ketua Program Studi,

Drs. Hamzon Situmorang, MS, Ph.D

N I P. 131422712

Medan, April 2008

PENGESAHAN

Diterima Oleh:

Panitia Ujian Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana Sastra dalam Bidang Ilmu Sastra Jepang pada Fakultas Sastra Jepang

Pada :

Tanggal :

Pukul :

Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara
Dekan

Drs. Syaifuddin, M. A, Ph.D

N I P. 131284310

Panitia Ujian

No. Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Hamzon Situmorang, MS, Ph.D ()

2. Drs.Amin Sihombing ()

3. M. Pujiono, M. Hum ()

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiart Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karuni-Naya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini berjudul *Pemilihan Umum Di Jepang (Sebelum Dan Sesudah Perang Dunia II)*, merupakan salah satu tugas akhir dalam melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Sastra Jepang Universitas Sumatra Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang. Dalam tahap-tahap penulisa skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Drs.Syaifuddin,M.A,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara
2. Bapak Drs. Hamzon Situmorang, MS, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti sidang pertanggungjawaban skripsi ini.
3. Bapak Drs. Amin Sihombing, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs.Eman Kusdiyana M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu mengoreksi penyelesaian skripsi ini.
5. Pak Pujiono, Pak Nandi, Pak Ali, serta seluruh Staff Dosen serta pegawai di kantor jurusan Sastra Jepang yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Ayahanda tercinta Sastra Sembiring dan Ibunda tercinta karonda Br tinambunan yang selalu memberikan do`a, dukungan dan cinta serta telah berkorban segala sesuatunya dalam membesarkan dan mendidik penulis.
7. Untuk kedua adik penulis Pharis Nazedi Sembiring (Enos) “Makasih bwat ketikannya ya bro...” dan Robbie Sembiring dan sepupu kecil penulis Hanugerah Sinulingga (sibuncit) Terima kasih atas do`a dan kasih sayang yang selalu diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Buat keempat teman penulis yang takkan pernah terlupakan Sarah, Aklima, Cindy, Marle.
9. Ocha (my 2nd self) as my best friend yang selalu memberi doa dan semangat kepada penulis.Serta bwt Beni, El, Dewi Canasta, B’alek, B’ferie “thanks”.
10. Teman-teman seangkatan Anwar, Alan, Nanik, Indra,Yogi, Nana, vivi, Lastri, Ibeth, Hotmen, Yetie, Hermin serta semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selama ini.

11. Untuk “GS nya Aklima” si BK 6073 GS yang selalu membantu di setiap kesempatan.

Atas semua ini penulis tidak dapat membalasya. Penulis hanya dapat mendo`akan semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Amin Ya Rabbal `Alamin....

Medan, April 2008
Penulis,

Serli Evantina S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.....	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN UMUM PADA POLITIK PEMERINTAHAN	
JEPANG.....	10
2.1. Sejarah Sistem Pemerintahan di Jepang.....	10
2.1.1 Sistem Pemerintahan Feodal.....	11
2.1.2 Sistem Pemerintahan Konstitusi	14
2.2. Sistem Kepartaian Dalam Pemilihan Umum di Jepang	19
2.2.1 Partai Demokrat Liberal.....	20
2.2.2 Partai Sosialis Jepang	24
2.2.3 Partai Komeito	24
2.2.4 Partai Demokrat Sosialis	25
2.2.5 Partai Komunis Jepang.....	25
2.2.6 Partai Demokratik Jepang	26
BAB III. SISTEM PEMILIHAN UMUM DI JEPANG	29
3.1. Sistem Pemilihan Umum Sebelum Perang Dunia II.....	29

3.2. Sistem Pemilihan Umum Setelah Perang Dunia II	32
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu>).

Dalam suatu negara pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu peristiwa yang dianggap sangat penting. Hal ini dikarenakan hasil yang diraih dari proses pemilu merupakan keputusan dari masyarakat yang berupa wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan membangun negara.

Sekarang ini di Indonesia pemilu yang diadakan ada dua tahap. Pertama pemilihan wakil rakyat (DPR/MPR), dan yang kedua dilakukan pemilihan terhadap pemimpin pemerintah Indonesia (Presiden / Wakil). Dan pada saat pemilihan wakil rakyat (DPR/MPR) diwakili oleh anggota partai dimana partai tersebut telah lolos melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU.

Pada masa orde baru partai yang ada hanya 3 partai, tetapi setelah reformasi 1998 jumlah partai banyak sekali. Oleh karena hal tersebut dilakukan seleksi bagi partai yang boleh ikut dalam pemilihan umum.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut *konstituen*, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, 24 jam kemudian dilakukan proses penghitungan. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Disisi lain pemilu menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, masing-masing.

Bagi masyarakat Indonesia pemilihan umum memiliki arti yang cukup bervariasi. Namun, dari berbagai pandangan tentang arti pemilu, lebih banyak anggota masyarakat yang menganggap pemilu adalah sebagai cara untuk memilih para pemimpin (34%) dibandingkan pandangan lainnya. Pandangan berikutnya tentang arti pemilu adalah sebagai sarana masyarakat untuk ikut menentukan arah dan kebijakan negara (18%), sekedar mencoblos kertas suara (15%), serta pergantian pemerintahan secara damai dan sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, masing-mains 10%, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu>).

Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia pada tahun 1955. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946.

Berbeda dengan Indonesia yang pemerintahannya dikepalai oleh seorang Presiden, Jepang memiliki sebuah keluarga kekaisaran yang diketuai oleh seorang kaisar, yang juga merupakan kepala negara Jepang. Namun, ia hanya memainkan peranan dalam upacara-upacara istiadat dan tidak memiliki kekuasaan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Kaisar Jepang merupakan lambang perpaduan negara dan rakyat Jepang. Walaupun begitu, Jepang juga mengenal pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyatnya.

Dalam pemilihan umum yang dilakukan di negara Jepang adalah menganut paham / sistem negara monarki konstitusional berdasarkan sistem Britania, dengan parlemen dua kamar yang disebut *Kokkai*. *Kokkai* adalah aparat kekuasaan negara tertinggi dan satu-satunya aparat negara yang menciptakan undang-undang di Jepang. Selain Undang-Undang, anggota parlemen juga bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian negara.

Parlemen Jepang tersebut terdiri dari Majelis Rendah Jepang (*Shuugi-in*); dan Majelis Tinggi Jepang (*Sangi-in*). Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di samping memutuskan undang-undang, *Kokkai* bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang.

Konstitusi Meiji tahun 1889 menetapkan Parlemen Kekaisaran (*Teikoku Gikai*) sebagai badan legislatif. Anggota Majelis Rendah dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan anggota *Kizoku-in* diangkat dari keluarga kekaisaran, bangsawan, dan orang-orang yang ditunjuk oleh kaisar.

Selanjutnya pemilihan umum pertama di Jepang dilakukan untuk memilih anggota DPR (Majelis Rendah) pada tahun 1890, namun pemilihan dibatasi hanya

untuk pria dewasa yang membayar pajak ¥ 15 atau lebih. Setelah tiga setengah dekade, jumlah pemilih meningkat dari yang tadinya tidak mencapai 500,000 menjadi 3 juta orang. Dalam tahun 1900 pemberian suara dilakukan secara rahasia dan kualifikasi pajak diturunkan menjadi ¥ 10, dengan demikian hampir membuat jumlah pemilih hampir dua kali lipat. Dalam tahun 1919 kualifikasi diturunkan sampai ¥ 3, kali ini jumlah pemilih menjadi lebih dari dua kali lipat. Kira-kira seperempat dari jumlah keluarga di Jepang pada saat itu mempunyai seorang anggota yang memiliki hak suara. Akhirnya dalam tahun 1925 kualifikasi pajak dihapuskan seluruhnya, dan semua pria dewasa diberi hak suara. Pada tahun 1925 Universal Manhood Suffrage Law memperluas jumlah pemilih menjadi 12 juta dengan mengakui hak suara untuk seluruh penduduk pria yang berusia 25 tahun atau lebih, meskipun demikian wanita tidak memiliki hak suara sampai Desember 1945.

Pada tahun 1946, Konstitusi Jepang yang berlaku hingga sekarang menetapkan Majelis Rendah Jepang dan Sangi-in sebagai badan legislatif. Anggota Majelis Rendah dan Sangi-in keduanya dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

1. Hak memilih: warganegara Jepang, usia di atas 20 tahun.
2. Hak dipilih: warganegara Jepang, usia di atas 30 tahun.

Masa jabatan adalah 6 tahun, dan setengah dari jumlah anggota Sangi-in dipilih setiap 3 tahun. Berbeda dengan masa jabatan Shūgi-in yang hanya 4 tahun dan setiap saat dapat dibubarkan Perdana Menteri Jepang atau melalui mosi tidak percaya, Sangi-in tidak dapat dibubarkan sehingga anggotanya bisa menjabat 6 tahun secara penuh.

I.2 Perumusan Masalah

Pada skripsi ini, topik yang dipilih adalah bagaimana pemilihan umum di Jepang sebelum dan sesudah terjadinya perang dunia II. Dalam pemilihan umum Jepang, yang memiliki sistem pemilu dalam dimana menganut 3 sistem yakni : 1. Pemilihan umum untuk Majelis Rendah (House of Representatives) atau Shugiin , 2. Pemilihan umum untuk Majelis Tinggi (House of Councillors) atau Sangiin 3. Pemilihan umum lokal yaitu pemilihan yang diadakan di daerah-daerah dengan tujuan memilih wakil-wakil daerah seperti Gubernur, wakil dan lainnya. Tahun 1946, Konstitusi Jepang yang berlaku hingga sekarang menetapkan Majelis Rendah Jepang dan Sangi-in sebagai badan legislatif. Anggota Majelis Rendah dan Sangi-in keduanya dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di Jepang ini menjadi menarik untuk dibahas karena pada dasarnya Jepang adalah negara yang dikepalai oleh seorang kaisar, namun dalam pelaksanaannya, sistem pemerintahan itu sendiri dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia yang dikepalai oleh presiden yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat dalam wadah pemilihan umum.

Permasalahan yang pokok yang akan diungkapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Jepang?
2. Bagaimana sistem pemilihan umum di Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II?

I.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada sistem pemilihan umum di Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Juga akan dibahas mengenai keterkaitan kaisar terhadap pemilihan umum di Jepang. Hal ini diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai sistem pemilihan umum di Jepang yang bersifat demokrasi meskipun dipimpin oleh seorang kaisar.

I.4 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

a. Tinjauan Pustaka

Pemilihan umum adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dimana setiap pemilu yang diselenggarakan menjadi momentum yang mendapat perhatian luas masyarakat. Meski masyarakat sudah berkali-kali berpartisipasi dalam pemilu, pesta demokrasi tahun ini tetap terasa beda. Salah satu penyebabnya adalah konsep Pemilu yang berbeda – beda (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu>).

Berdasarkan artikel 1998 edisi “*Konsep dan Sistem Pemilihan Umum*”, (http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep_Pemilu) mengatakan bahwa “Sistem Pemilihan Umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya (1) pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan (2) suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.”.

Pada saat pemilihan SBY - JK, ada asumsi bahwa aturan pemilu masih seperti sekarang, yaitu pemilu legislatif dan pilpres kedua-duanya diselenggarakan secara nasional, maka konsep golonganlah yang digunakan pemilih dalam pemilu legislatif dan konsep kelas sosial yang digunakan pemilih dalam pilpres (dikutip dari Harian Merdeka, 2004).

Menurut Muchamad Yuliyanto dalam Suara Harian Merdeka , 5 Januari 2004 mengatakan “Pemilu sebagai instrumen merealisasikan demokrasi akan menjadi lebih berkualitas dan dinamis ketika diikuti sistem yang demokratis serta partai politik yang berkualitas pula. Parpol sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan konstituen idealnya akan memilih dan menyeleksi secermat mungkin para caleg yang akan menyuarakan aspirasi pemilihnya”

Melihat kondisi sementara pada Pemilu 2004 amat dikhawatirkan hanya menjadi arena masuknya politikus yang sangat buruk etika moralitasnya yang populer disebut politikus tercela alias busuk sebagaimana yang ditunjukkan Gerakan Nasional Jangan Pilih Politikus Tercela.

Sistem pemilu dengan mencantumkan nama caleg pada parpol dan foto calon DPD merupakan arena untuk "mengadili" dalam bentuk putusan menjatuhkan pilihannya pada saat pemungutan suara. Ketika para calon tersebut diketahui tersangkut masalah yang berhubungan dengan tindak kejahatan, dan ternyata bebas dari jeratan hukum formal dan tanpa malu mencalonkan diri, maka inilah saatnya masyarakat menjatuhkan hukuman sosial berupa penolakan dalam pemilu.

b. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti (Nawawi,2001:39-40).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sejarah. Dalam pendekatan sejarah kita dapat melakukan penguraian data-data yang diperoleh secara kronologis.

Pendekatan historis adalah pendekatan yang melihat konsekuensi sebagai sarana untuk memahami aspek-aspek kebudayaan yang lebih luas dimana karya sastra adalah gambaran kehidupan masyarakat di zamannya (Ratna,2004:66).

Dari pendekatan historis ini, penulis bermaksud untuk menganalisa masalah yang diangkat dalam skripsi ini dengan melihat urutan sejarah pemerintahan dan pemilihan umum di Jepang.

I.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui sistem pemerintahan Jepang.
- 2) Untuk mengetahui sistem Pemilihan Umum Di Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

b. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian terhadap “ *Pemilihan Umum Di Jepang Sebelum Dan Sesudah Perang Dunia II*”, memiliki tujuan yakni :

1. Untuk menambah wawasan tentang sistem pemerintahan Jepang.
2. Untuk menambah wawasan tentang pemilihan umum di Jepang.

I.6 Metode Penelitian

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni yang pertama metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta atau data-data yang tampak atau semestinya .

Dan dalam metode deskriptif yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu suatu metode yang diartikan sebagai langkah – langkah dalam penyusunan yakni dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklafikasikan, mengkaji, menginterpretasikan data.

Menurut *Koentjaraningrat* (1976 : 30) bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.

Pada pengumpulan data-data mengenai fungsi tenno dalam pemerintahan, bagaimana masalah-masalah, dan bagaimana hubungan kedalam ritual Jepang yang mampu bertahan dalam perkembangan teknologi yang memiliki pesona kuat dalam kehidupan Jepang (Yakuzawa, Y : 1947)

Buku-buku tersebut dipelajari hingga paham, kemudian pendapat atau filsafat dari Jepang untuk menganalisa karya tulis ini. Dan metode yang kedua yakni metode kepustakaan dimana suatu kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM PADA POLITIK PEMERINTAHAN
JEPANG

2.1. Sejarah Sistem Pemerintahan Jepang

Sebelum membahas bagaimana keadaan politik pemerintahan Jepang , baik sekali rasanya jika mengetahui bagaimana makna dari Negara Jepang tersebut.

Jika Ditinjau dari huruf kanjinya, kata Nihon berasal dari Huruf *Hi* yang berarti "matahari" dan *Hon* yang berarti "asal". Jika kedua kata tersebut disatukan maka kata *Nihon* memiliki arti asal matahari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Nihon* memiliki makna sebagai asal matahari terbit atau negara lebih dikenal sebagai negara matahari terbit.

Nama ini berasal dari utusan resmi negara China, dan merujuk kepada kedudukan relatif Jepang di sebelah timur benua Asia. Sebelum itu, Jepang dikenal sebagai *Yamato Wa* digunakan di negara China pada zaman Tiga Negara. Kata Jepang dalam bahasa Indonesia diturunkan dari kata Jepun, berasal dari bahasa Kanton, yang membawa sebutan *Yat Pun*, (<http://id.wikipedia/Jepang>)

Mengenai sistem pemerintahan Jepang yang diawali dengan sistem politik tradisional yang berpusat pada sistem klen, yakni sistem yang berlaku sebelum terbentuknya negara Jepang purba pada zaman Yamato (Ishii, 1988 :xii). Terbentuknya negara Jepang purba, adalah sebagai akibat lahirnya sistem politik yang berpusat pada klen-klen penakluk yang mengasosiasikan dirinya dengan dewa, yang dikenal dengan sistem Tenno purba. Sistem ini semakin pudar karena kekuasaan yang diambil alih oleh kepala-kepala klen yang sebenarnya adalah pembantu Tenno dalam melaksanakan sistem penguasaan, dan ini berlangsung

selama zaman Nara dan Heian (abad ke-8). Pada abad ke-10 dan 11 banyak terjadi perubahan dalam bidang politik. Banyak tanah telah berangsur-angsur ditarik dari penguasaan negara kedalam tangan pemilik-pemilik pribadi yang sering bebas dari beban-beban pajak. Keadaan ini akhirnya membawa Jepang kepada suatu masa yang disebut zaman Feodalisme, yang berlangsung kurang lebih sampai 7 abad kedepan.

2.1.1 Sistem Pemerintahan Feodal

Pada abad ke-12 Jepang berada di ambang penyimpangan yang lebih besar dari norma-norma Asia Timur. Yaitu, berkembangnya suatu sistem feodal, yang selama 7 abad berikutnya akan menempuh tahap-tahap yang memiliki banyak persamaan yang menyolok dengan pengalaman feodal Eropa Barat (abad 9 – abad 15). Kesamaan-kesamaan dengan Eropa ini tidak dapat dinyatakan sebagai akibat saling pengaruh, karena tidak terdapat kontak antara keduanya. Persamaan-persamaan itu kiranya lebih mungkin disebabkan oleh kesamaan dalam ramuan sosial dan budaya, yang bercampur di kedua wilayah ini berupa masyarakat kesukuan dan sistem politik, ekonomi yang relatif maju. Di Barat, kelompok-kelompok suku Jerman mewarisi sisa-sisa rongsokan pemerintahan sistem kekaisaran Romawi. Di Jepang, penduduk pulau yang bersifat kesukuan telah menerima pranata-pranata politik dan sistem tanah kerajaan Cina. Dalam keduanya, kedua unsur ini mempengaruhi satu sama lain selama masa yang lama dalam isolasi yang relatif, dan dari percampuran timbul suatu sistem politik yang rumit berdasarkan ikatan kesetiaan pribadi dalam suatu aristokrasi militer dan peleburan kekuasaan umum hak-hak pribadi atas tanah.

Sementara wibawa dan kekuasaan pemerintah pusat merosot di Jepang, berbagai kelompok pemimpin setempat dalam provinsi-provinsi bersatu untuk saling melindungi. Kelompok-kelompok ini terdiri dari para pejabat pemerintahan provinsi yang tua dan para pemilik tanah setempat. Mula-mula kelompok tersebut hanya terdiri dari para kerabat atau para tetangga yang pada umumnya diketuai seorang tokoh karismatis.

Selanjutnya, orang Jepang memiliki perasaan yang kuat akan kekuasaan turun-temurun, maka tidak ada yang lebih berwibawa dari pada keturunan kaisar. Hal itulah yang mengakibatkan banyak kelompok dipimpin oleh cabang keluarga kaisar yang masih muda, yang telah menerima nama keluarga mereka dan pindah ke provinsi-provinsi untuk mencari harta sebagai wakil kekuasaan pusat (Edwin O. Reischauer, 1982 : 69-70)

Kelompok-kelompok tersebut sebenarnya adalah prajurit siap siaga yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Prajurit-prajurit ini lama-kelamaan melahirkan seorang Shogun yaitu panglima tertinggi tentara kaisar. Selama beberapa waktu posisi Shogun lebih mendominasi daripada kaisar, dan dikenal dengan orde yang bersifat politik-militer berdasarkan *onkyu* (tanah / hak yang diberi oleh pemimpin kepada pengikutnya pada zaman Feodalisme) yang disahkan resmi dan hubungan pemimpin dan pengikut Bushi sebagai “Feodalisme” atau sebagai orde politik Bakufu (Ishii. 1989:49). Selama abad ke-16 suatu tipe daerah-daerah feodal yang terorganisasi secara ketat yang lebih efisien tumbuh melalui penaklukan dan penggabungan daerah yang kurang berhasil sehingga pada akhir abad ini Jepang telah bersatu kembali secara politis.

Penyatuan kembali ini sebagian besar adalah jerih payah tiga orang pemimpin militer yaitu Oda Nobunaga, yang merebut Kyoto dalam tahun 1568, berpura-pura mendukung Shogun Ashikaga terakhir, dan kemudian menaklukkan tuan-tuan yang lebih kecil di Jepang tengah dan menghancurkan kekuasaan biara Budha. Setelah Oda Nobunaga terbunuh pada tahun 1582 ia digantikan oleh jenderal yaitu Hideyoshi. Pada tahun 1590 Hideyoshi menetapkan kekuasaannya atas seluruh negara, dengan membinasakan semua saingannya atau memaksa mereka menjadi pengikutnya. Tokugawa Ieyasu, seorang pengikut Hideyoshi yang diberi daerah oleh Hideyoshi di Edo (sekarang Tokyo). Ieyasu mempertahankan basis kekuasaannya dibagian timur Jepang dan mengerahkan kakuatannya untuk mengkonsolidasi supremasi keluarganya atas dasar pola yang sudah ditetapkan oleh Hideyoshi. Ia berhasil dalam hal ini, dan ahli-ahli warisnya tetap menjadi penguasa di Jepang sampai pertengahan abad ke-19.

Hasil dari politik yang dilakukan Tokugawa Ieyasu kemudian dimanfaatkan oleh Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya Politik Isolasi. Latar belakang dari lahirnya Politik Isolasi ini banyaknya misionaris Kristen yang datang menyebarkan Agama Kristen.

Berkembangnya Agama Kristen akan menjadi mimpi buruk bagi kekaisaran, oleh sebab itu Kaisar mengambil langkah untuk tidak berhubungan dengan negara asing, kecuali dengan Pedagang-Pedagang Belanda yang dinilai menguntungkan. Itu pun hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Pulau Dejima, Nagasaki.

Politik Isolasi ini bertahan lebih dari 250 tahun sampai pada tahun 1853, Komodor Perry dari angkatan laut Amerika Serikat dengan 4 buah kapalnya memaksa Jepang untuk membuka diri kembali terhadap dunia luar.

2.1.2 Sistem Pemerintahan Konstitusi

Restorasi Meiji yang dianggap sebagai titik awal perkembangan Jepang terjadi pasca berakhirnya kekuasaan Tokugawa, Kekaisaran Tokugawa berakhir pada tahun 1867, dan digantikan dengan Kekaisaran Meiji. Pada zaman ini Jepang banyak mengalami kemajuan. Dan hanya dalam beberapa dekade mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara barat. Pada zaman ini pula Edo berganti nama dengan Tokyo, dan kasta-kasta yang ada pada zaman feodal dihapuskan. Restorasi Meiji benar-benar mampu menggerakkan seluruh aset negara yang ada, sehingga pada beberapa peperangan, Jepang meraih kemenangan.

Pada tahun 1880-an Jepang merasa membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang lebih pasti seperti layaknya era Tokugawa yang kuat dimasa lalu. Dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman negara barat yang terkemuka, Jepang memutuskan bahwa sistem pemerintahan harus diwujudkan dalam suatu konstitusi.

Dalam konstitusi yang baru inilah negara Jepang mulai membangun kabinet, yang tentu saja kekuasaannya berada disekitar kaisar. Namun sesungguhnya kaisar tidak diharapkan untuk memerintah, tetapi hanya untuk mengesahkan keputusan yang dibuat oleh menteri.

Konstitusi baru akhirnya dikeluarkan dalam tahun 1889. Dibawah kaisar para menteri pemerintahan dikelompokkan bersama dalam suatu kabinet gaya

barat dibawah seorang perdana menteri. Kabinet-kabinet pada tahap awal hanya merupakan sedikit lebih dari giliran genro (sesepuh negarawan)sendiri. Dibawah kabinet dibentuk dinas sipil yang dimodernisasi, yang diciptakan menurut model Jerman yang paling progresif ketika itu.

Pada awalnya para lulusan Universitas Tokyo, lembaga pemerintah yang didirikan pada tahun 1877, secara otomatis dinyatakan memenuhi syarat untuk jabatan-jabatan dinas sipil atas, tetapi segera suatu sistem dibuat untuk menentukan kualifikasi untuk kedudukan-kedudukan ini dengan ujian, dan dengan inilah Jepang membangun suatu birokrasi dina sipil elit, yang sangat bebas, dan luar biasa efisien.

Konstitusi memuat sejumlah pasal yang menjamin hak-hak luas bagi rakyat, tetapi tiap kalimat dibubuhi ketentuan ungkapan seperti “dalam batas-batas hukum”, yang sangat mengurangi perlindungan yang diberikan. Sistem peradilan, walaupun sangat terpusat, mendapat kebebasan yang luas sekali, dan sistem ini mengelola peradilan dengan ketaatan yang cermat pada hukum.

Aspek yang paling baru dari konstitusi adalah diciptakannya majelis nasional dua kamar,yaitu Majellis tinggi(House Of Councillor) atau disebut juga Sangiin. Majelis ini memiliki 242 anggota yang dipilih dalam 6 tahun. 146 orang berada dikursi multi konstituen atau prefektur, sedangkan 96 orang lainnya berada di tingkat nasional. Setengah dari keseluruhan anggota Majelis Tinggi datang dari pemilhan umum yang diadakan setiap 3 tahun. Majelis Tinggi atau Majelis Bangsawan, menurut model majelis bangsawan Inggris, diisi hampir seluruhnya berdasarkan keturunan atau pengangkatan. Majelis ini memerlukan derajat kebangsawanan, dibentuk dalam tahun1884 dari bekas bangsawan-bangsawan

istana, tuan-tuan feodal, dan para anggota kelompok pimpinan yang baru. Majelis Rendah (House Of Representatives) atau disebut juga Shugiin, terdiri dari 480 anggota dipilih setiap 4 tahun, 300 orang berada di kursi tunggal konstituen dan 180 anggota lainnya oleh proporsional representatif di 11 blok distrik. Majelis ini dipilih oleh para pembayar pajak pria yang membayar lebih dari ¥ 15, kelompok yang sangat terpilih, terdiri tidak lebih dari 1% dari jumlah penduduk. Diperlukan suatu mayoritas suara dari kedua majelis untuk meluluskan anggaran belanja dan untuk setiap undang-undang yang akan berlaku secara parlemen.

Ini merupakan sejenis pemerintahan rakyat yang sangat terbatas dan telah sering dilukiskan sebagai suatu kemunduran atau “penghianatan” terhadap demokrasi, tetapi orang Jepang tidak bermaksud untuk menciptakan suatu sistem dengan demokrasi yang sepenuhnya, dan orang-orang Barat yang mengetahui waktu itu merasa bahwa mereka benar-benar terlalu tergesa-gesa menempuh jalan yang hanya cocok untuk orang Barat. Seperti yang dikemukakan oleh seorang pengulas, Jepang seolah-olah mencoba berlari sebelum mereka bisa berjalan.

Karena tidak ada pengalaman rakyat mengenai pemilihan-pemilihan atau pengertian tentang lembaga-lembaga parlementer, sangatlah diragukan bahwa sistem yang lebih demokrasi benar-benar akan dapat bekerja dalam tahun 1890. Bagaimanapun, walaupun terbatas, parlemen Jepang, *Diet*, demikian disebut namanya, merupakan percobaan parlemen pertama yang berhasil diluar Barat, dan walaupun pada mulanya sudah goyah, sistem ini dapat bertahan dan ternyata cukup luwes untuk pertumbuhan evolusioner yang baik sekali.

Dalam pemerintahan Jepang Perdana Menteri Jepang (*Naikaku sōri daijin*) adalah pemimpin pemerintahan Jepang. Sang Perdana Menteri dilantik

oleh sang Kaisar setelah dipilih oleh parlemen Jepang dari anggotanya, dan harus terus mempunyai kepercayaan Badan Penasehat agar dapat tetap menjabat. Dia juga adalah ketua kabinet Jepang dan melantik dan memecat para menteri.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para Menteri. Perdana Menteri merupakan salah seorang anggota parlemen yang dilantik oleh rekan-rekan sejawatnya. Perdana Menteri berkuasa melantik menteri-menteri yang lain.

Kabinet-kabinet Jepang senantiasa berubah seiring bergantinya perdana menteri yang memiliki hak menentukan siapa-siapa yang akan menjadi anggota kabinet. Kabinet Yasuo Fukuda, perdana menteri yang menggantikan posisi Shinzo Abe yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari kabinet Jepang. Yasuo Fukuda adalah perdana menteri ke-91 yang dimiliki oleh Jepang. Putera sulung dari Takeo Fukuda yang juga merupakan perdana menteri Jepang ke-67 yang memimpin pada tahun 1976 sampai dengan 1978. Yasuo Fukuda dilantik pada tanggal 26 september 2007. Yasuo Fukuda yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat Liberal (LDP), salah satu partai terbesar di Jepang, sebenarnya menganggap kabinet ini adalah kabinet terpojok karena merasa kurang mendapat dukungan dari masyarakat, dan ia khawatir hal ini akan membawa dampak yang kurang baik terhadap partainya. Maka dari itu Fukuda didesak agar segera mengadakan pemilihan umum.

Dalam kabinet Fukuda telah ditetapkan beberapa nama-nama menteri yang akan membantu Fukuda selama memerintah. Berikut beberapa nama menteri yang ada dalam kabinet Fukuda :

1. Mensesneg dipegang Kaoru Yosano;

2. Menteri Keuangan dijabat Fukushiro Nukaga (mantan Kepala Badan Pertahanan Jepang);
3. Menteri Pertahanan, Infrastruktur dan Transportasi dijabat Tetsuzo Fuyushiba, ia adalah satu-satunya menteri yang bertahan di kabinet Abe sebelumnya;
4. Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan dipegang Yoichi Masuzoe (sebelumnya ia adalah profesor politik di Universitas Tokyo);
5. Menteri Lingkungan Hidup dipegang Ichiro Kamoshita (mantan anggota parlemen);
6. Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dijabat Akita Amari.
7. Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dipegang Takehiko Endo (anggota majelis rendah Diet);
8. Menteri Kehakiman dipegang Kuniyo Hatoyama (mantan menteri pendidikan);
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Iptek dijabat Bunmei Ibuki; Menteri Reformasi Administrasi dan Jasa Keuangan dijabat Yoshimi Watanabe; Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal dipegang Hiroko Ota (satu-satunya menteri yang bukan berasal dari Diet);
10. Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi dijabat Hiroya Masuda (satu-satunya menteri yang bukan berasal dari anggota legislatif);
11. Menteri Urusan Wilayah Utara adalah Okinawa Fumio Kishida;
12. Menteri Penanggulangan Penurunan Angka Kelahiran Jepang dijabat Yako Kamikawa.

2.2 Sistem Kepartaian Dalam Pemilihan Umum di Jepang

Dalam proses pemilihan umum dinegara manapun partai politik adalah organisasi yang paling mencuat namanya, hal ini dikarenakan partai politik sebagai tempat para calon wakil rakyat bernaung dan berusaha mencari simpati sebanyak-banyaknya dari rekan-rekan separtainya agar mendapat dukungan untuk dicalonkan dalam pemilihan umum.

Hal serupa juga terjadi di negara Jepang, ketika negara ini memutuskan menggunakan sistem konstitusi untuk menjalankan pemerintahannya maka seketika itu juga berdiri partai politik yang mencoba meraih peruntungan dalam ajang pemilihan umum.

Partai politik muncul diJepang setelah Restorasi Meiji (1868), memperoleh pengaruh yang besar dalam pembukaan Imperial Diet (1890), dan mencapai kekuasaan politik sementara sepanjang perang dunia I. Dikarenakan oleh kemiliteran, mereka menolak ditahun 1930-an dan dibubarkan kemudian ditampung oleh Imperial Rule Assistance Assosiation pada tahun 1940. Partai politik dibangkitkan kembali dalam naungan Allied Occupation diawal perang dunia II, dan sejak 1952, ketika Jepang memperoleh kembali kemerdekaannya,partai politik menjadi kekuatan utama dalam politik-politik nasional dan lokal.

Asosiasi Politik (seisha), yang berdiri ditahun 1870-an dan biasanya menjadi kelompok pembentuk “samurai” yang tidak puas, pemilik-pemilik tanah pedesaan, dan kaum intelektual perkotaan, merupakan pelopor dari partai politik. Permintaan mereka untuk sebuah pemilihan majelis mengantarkan mereka pada konfrontasi dengan kaum Oligarki Meiji atau Genro, yang bereaksi melalui

penyebaran penindasan dalam hukum untuk mengontrol publikasi, pencemaran nama baik dibidang politik, dan majelis publik.

Kedua pembangun partai utama diawal preode Meiji (1868-1912), adalah Itagaki Taisuke (1837-1919) dan Okuma Shigenobu (1838-1922). Itagaki telah bergabung dengan pemerintah ditahun 1871 tetapi mengundurkan diri ditahun 1873 dan disepanjang tahun berikutnya mendirikan proto partai pertama, Aikoku Koto (Partai Patriot Publik). Itagaki dan kaum patriotnya juga mendirikan sebuah grup regional di Osaka yang disebut Aikokokusha (kelompok patriot), dimana merupakan dasar untuk menemukan partai nasional pertama diJepang ditahun 1881, Jiyuto(Partai Liberal). Banyak pesaing-pesaing diantara pencetus-pencetus “samurai” yang tidak puas membangun partai yang sama. Antara tahun1882 dan 1886 puncak pemberontakan bersenjata melawan pemerintah pun terjadi, yang menimbulkan reaksi berupa pengumuman Peace Preservation Law dihun 1887, yang mempererat batasan-batasan aktivitas politik.

Okuma mengundurkan diri dari pemerintahan pada tahun 1881 dan ditahun 1882 membentuk Rikken Kaishinto (Partai Penyusunan Konstitusi), yang menarik adalah anggota-anggotanya kebanyakan dari calon intelejensi perkotaan, partai ini aktif sampai 1896. Partai yang lebih kolot seperti Rikken Teiseito (Constitutional Imperial Rule Party ; 1882), mewakili dirinya sebagai pembela pemerintah Oligarki.

2.2.1 Partai Demokrat Liberal

Partai Demokrat Liberal berdiri pada tahun 1955 merupakan sebuah perkumpulan politik yang terdiri dari pertama-tama anggota-anggota *Diet* dan

kemudian para pendukungnya dan calon penggantinya dikalangan anggota majelis-majelis lokal serta para gubernur dan walikota. Dengan kata lain, pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan politisi profesional dan hanya sedikit anggota massa atau bahkan mirip organisasi biasa.

Partai Liberal Demokrat (PLD) yang terbentuk dari gabungan partai liberal dan partai demokrat pernah memegang pemerintahan yang cukup lama - dari tahun 1955 sampai kalah di pemilu tahun 1993 - hampir 40 tahun. Banyak orang berkesimpulan dan dengan tegas menyatakan bahwa, LDP adalah satu partai yang tidak liberal dan juga tidak demokratis.

Menurut orang-orang LDP bahwa LDP mewakili lebih dahulu posisi yang konservatif daripada posisi yang liberal, dengan contoh dalam kebijaksanaan politiknya dan politik hukumnya. LDP lebih banyak menunjukkan suatu gabungan kelompok-kelompok (yang disebut faksi-faksi) yang konsentrasi politiknya tergantung pada gaya pimpinan tertentu. Jadi, orientasi LDP bukan pada idealisme partai. Ia berwatak agak kebarat-baratan.

Partai demokrat Liberal sudah semenjak didirikan menguasai mayoritas kursi dalam *Diet* dan mendapat dukungan mayoritas, atau mendekati mayoritas para pemilih. Sebagai partai yang berkuasa dan yang jelas paling besar, layak mendapat perhatian yang seksama, terutama karena banyak yang dapat dikatakan mengenai partai ini sedikit-dikitnya berlaku pula bagi partai lain.

Jantung Partai Demokrat Liberal adalah anggota-anggota *Diet*. Pemberian suara golongan ini yang terkoordinasi untuk memilih seorang perdana menteri dan menyokong program perundang-undangan adalah pokok bagi efektivitas kekuasaan partai dan bagi eksistensinya. Hal ini merupakan prestasi bagi partai

tersebut karena seperti yang kita ketahui masyarakat tidak begitu tertarik dengan partai, mereka lebih memandang calon yang mereka pilih secara personal, bukan karena partainya.

Partai Demokrat Liberal mencapai solidaritas ini dalam tindakan *Diet*, walaupun kenyataannya tidak ada suatu ideologi pun yang jelas yang mempersatukannya. Para anggotanya adalah pewaris dari kedua arus politik yang utama sebelum perang, yang masing-masing pun tidak pernah menganut ideologi yang dirumuskan secara jelas. Pada masa mulanya keduanya bersatu dalam perjuangan untuk merebut lebih banyak kekuasaan dalam *Diet*. Naiknya suara dari apa yang disebut partai “progresif” memaksa keduanya untuk bersama-sama dalam tahun 1955 mengkonsolidasikan kekuatan mereka, tetapi ini hanyalah merupakan perkawinan secara gampang saja. Partai Demokrat Liberal lebih cenderung pada posisi yang lebih konservatif ketimbang partai-partai progresif, tetapi dikalangan para anggotanya terdapat aneka pandangan yang luas mengenai hampir setiap isu.

Satu hal yang penting dari Partai Demokrat Liberal adalah terbaginya anggota-anggotanya dalam golongan-golongan. Ini biasanya dikecam sebagai kekuatan-kekuatan yang terpecah dalam partai, tetapi sebenarnya merupakan salah satu mekanisme pokok yang digunakan partai untuk mendapatkan usaha yang terkoordinasi erat dalam *Diet*.

Golongan-golongan dalam kebiasaan Jepang yang khas terjadi dari pengikut-pengikut dan seorang pemimpin atau dalam beberapa hal suatu kelompok pimpinan yang kecil bertindak atas nama sang pemimpin. Sering kali terdapat kira-kira tiga atau empat golongan besar, dengan masing-masing anggota

antara 40 dan 80 orang, dan barang kali ada beberapa yang lebih kecil lagi. Bila golongan-golongan yang lebih besar menjadi lebih besar lagi mungkin akan pecah, dan bila yang kecil-kecil menjadi terlalu kecil, maka akan menjadi sangat tidak efektif. Masing-masing biasanya mempunyai seorang pemimpin golongan yang jelas diakui, yang merupakan salah satu orang kuat dalam parlemen dan dalam partai.

Kadang-kadang dikemukakan bahwa Partai Demokrasi Liberal hanyalah merupakan koalisi golongan-golongan. Pasti memang demikian keadaannya secara operasional, tetapi tidak benar dalam arti yang lebih mendasar.

Dwiasal Partai Demokrat Liberal pertama-tama memainkan peranan dalam persatuan antar golongan, tetapi faktor ini telah menghilang hampir seluruhnya.

Banyak analisis telah menekankan adanya perpecahan yang diduga ada diantara golongan-golongan ini yang dipimpin oleh para bekas birokrat dan mereka yang dibawah politisi kawakan, tetapi pembagian demikian tidak pernah menjadi persoalan bagi anggota. Seperti juga pembentukan *Seiyukai* dalam tahun 1900 dan kekuatan yang bertambah dari partai-partai dalam tahun 1920-an membuat birokrat-birokrat yang ambisius memasuki partai-partai, maka supremasi Diet sepenuhnya sesudah perang mengakibatkan para bekas birokrat pada kedudukan pimpinan partai, dimana mereka secara efisien bertindak sebagai orang yang berpengalaman dalam menjalankan organisasi birokrasi Jepang.

Semua perdana menteri kawakan sesudah perang berasal dari birokrat. Tetapi Tanaka, yang menjadi perdana menteri dari tahun 1912 sampai 1914 asalnya bukan birokrat elit, tetapi usahawan dan politikus yang maju atas usaha

sendiri, dan Miki yang menggantikannya dari tahun 1974 sampai Desember 1976, adalah orang terakhir dari politisi sebelum perang.

2.2.2 Partai Sosialis Jepang

Partai Sosialis Jepang (JSP) pertama kali dibentuk pada bulan November 1945 melalui gabungan beberapa partai protelar yang berbeda, yang telah ada sebelum perang. Setelah pecah menjadi partai sayap kanan dan kiri pada tahun 1951, partainya disatukan kembali dan muncul untuk kedua kalinya pada bulan Oktober 1955. Sasarannya ialah perwujudan sosialisme melalui “revolusi damai dan demokrasi” dengan mendukung Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1986, Doi Takako terpilih ketua JSP, sehingga menjadi pertama yang memimpin partai politik yang besar di Jepang. Partai ini meraih suara sebanyak 19% dalam pemilihan umum tahun 1946 serta 26% dalam tahun 1947, ini jelas menunjukkan meluasnya popularitasnya yang meningkat bila dibandingkan dengan sebelum perang, ketika itu partai ini memperoleh 5% suara dalam tahun 1936 dan hampir 10% pada tahun 1937.

2.2.3 Partai Komeito

Partai lain yang eksistensinya cukup menarik perhatian adalah Komeito atau disebut juga partai pemerintah bersih. Komeito (Partai Pemerintah Bersih) dibentuk pada bulan November 1964, semula sebagai tangan politik *Soka Gakkai*, sebuah lembaga awam dari sekte *Nichiren Shoshu* agama Budha. Ketika untuk pertama kali turut dalam pemilihan umum pada bulan Januari 1967, Komeito berhasil dengan terpilihnya 25 calonnya ke Dewan Perwakilan. Setelah itu,

Komeito menyatakan diri bebas dari agama. Tujuannya antara lain adalah pembangunan suatu masyarakat sejahtera berdasarkan konsep "sosialisme humaniter".

2.2.4 Partai Demokrat Sosialis

Partai Demokrat sosialis (PSD) didirikan pada bulan Januari 1960 oleh suatu kelompok yang memisahkan diri dari JSP setahun sebelumnya. Partai ini melawan ideologi yang ekstrem dan mengabdikan diri kepada penciptaan masyarakat sosialis melalui proses-proses demokrasi. Menurut program partainya, DSP yang berusaha "mengatasi kapitalisme dan ketotaliteran, baik kiri maupun kanan", bukanlah partai sesuatu golongan tetapi" suatu partai rakyat yang mengakui adanya kepentingan yang berbeda antara berbagai kelompok sosial dan sekaligus mengakui adanya kepentingan nasional dan sekaligus mengakui adanya kepentingan yang berbeda antara berbagai kelompok sosial dan sekaligus mengakui adanya kepentingan nasional bersama".

Partai Sosial Demokrat Bersatu secara resmi dibentuk pada bulan Maret 1978 melalui gabungan dua kelompok politik yang kecil, yang satu dengan tiga anggota Diet yang meninggalkan Partai Sosialis setahun sebelumnya, dan yang satu lagi dari tiga anggota Diet dari Liga Warga Sosialis. Sasarannya ialah perwujudan" sosialisme yang baru dan liberal".

2.2.5 Partai Komunis Jepang

Partai Komunis Jepang (JCP) didirikan sebagai perkumpulan politik di bawah tanah pada bulan Juli 1922. Partai ini baru keluar sebagai partai sah setelah

Perang Dunia II. JCP bertujuan mewujudkan masyarakat komunis di Jepang melalui "revolusi rakyat yang demokratis dan disusul dengan revolusi social".

2.2.6 Partai Demokratik Jepang

Partai Demokratik Jepang (*Minshutō*) atau Partai Demokrat Jepang (bahasa Inggris: *Democratic Party of Japan* atau DPJ) adalah salah satu partai politik di Jepang. Partai yang berdiri pada tanggal 8 Januari 1998 ini merupakan partai terbesar nomor dua setelah Partai Demokrat Liberal, sekaligus partai oposisi terbesar di Jepang. Berdasarkan hasil pemilu 29 Juli 2007, Partai Demokratik Jepang memperoleh kursi terbanyak di Majelis Tinggi Jepang.

Partai Demokratik Jepang dibentuk dari penggabungan Partai Demokratik Jepang (*Minshutō*) yang lama (1996-1998), Partai Pemerintahan Rakyat (*Minseitō* atau *Good Governance Party*), Partai Fraternalitas Baru (*Shintō Yūai* atau *New Fraternity Party*), dan Serikat Reformasi Demokrat (*Minshu Kaikaku Rengō* atau *Democratic Reform Union*).

Bulan September 2003, Partai Liberal (1998-2003) ikut bergabung. Dalam Pemilihan Majelis Tinggi Jepang bulan Juli 2004, Partai Demokratik Jepang menjadi partai oposisi pertama dalam sejarah Jepang yang berhasil memperoleh kursi terbanyak (50 kursi) dalam Majelis Tinggi. Dalam Pemilihan Majelis Tinggi Jepang (29 Juli 2007), Partai Demokratik Jepang memperoleh 60 kursi, sekaligus untuk pertama kali berhasil menjadi partai mayoritas di Majelis Tinggi sejak partai ini didirikan.

Faksi Garis Poros Oposisi (*Tairitsu Jiku Rosen*) pimpinan sekjen Ichiro Ozawa bermaksud menguatkan kesan bahwa partai ini berbeda dari Partai

Demokrat Liberal (LDP). Faksi Garis Usul Tandingan (*Taian Rosen*) pimpinan mantan ketua Seiji Maehara dengan anggota muda dari kelompok neokonservatif bermaksud bersaing dengan LDP dalam soal usulan kebijakan politik. Selain itu, partai ini memiliki faksi kiri-tengah yang dipimpin wakil juru bicara Majelis Tinggi, Takahiro Yokomichi.

Pada tanggal 29 Juli 2007, Partai Demokrat Liberal kalah telak dalam pemilu Majelis Tinggi Jepang sehingga majelis tinggi kini dikuasai Partai Demokrat yang sebelumnya menjadi pihak oposisi.

Beberapa partai yang telah disebutkan diatas adalah beberapa partai yang kerap mendominasi pada pemilihan-pemilihan umum yang diadakan di Jepang. Perang dingin kerap terjadi antar mereka, hal yang wajar terjadi dalam sebuah kompetisi, akan tetapi mereka tetap profesional dengan tetap bersaing secara sportif, setidaknya begitulah yang sering terlihat. Ada anggapan bahwa jarang terjadi kerusuhan di Jepang seperti yang banyak terjadi di negara-negara lain tak terkecuali Indonesia adalah imbas dari adanya partai raksasa seperti Partai Demokrat Liberal, sehingga diperkirakan terjadi monopoli oleh partai tersebut. Hal lain yang paling mempengaruhinya adalah budaya turun-temurun yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang, sehingga adalah hal biasa bila petinggi di negara sakura tersebut dalam kurun waktu yang sangat lama berasal dari partai yang itu-itu terus. Hal ini terbukti dari semenjak Partai Demokrat Liberal berdiri hampir semua perdana menteri Jepang pada saat itu adalah orang-orang dari LDP.

Berikut ini adalah hasil pemilihan Majelis Tinggi atau Dewan Majelis yang diadakan pada tanggal 29 Juli 2007. Partai Demokrat Jepang meraih suara sebanyak 40 kursi untuk di prefektur dan 20 kursi untuk di proporsional.

Sedangkan posisi kedua diduduki oleh Partai Demokrat Liberal dengan meraih 23 kursi di prefektur dan 14 kursi di proporsional. Hasil seperti ini sering terjadi semenjak Partai Demokrat Jepang berdiri, partai ini seperti sangat menguasai Dewan Majelis, akan tetapi tetap saja Partai Demokrat Liberal juga yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan Jepang.

Hal ini tentu saja karena LDP tetap unggul pada pemilihan Majelis Rendah seperti hasil pemilihan Majelis Rendah pada tahun 1995 dimana LDP meraih kursi sebanyak 219 kursi untuk lokal dan 77 kursi untuk blok distrik. Sedangkan DPJ hanya meraih 52 kursi untuk lokal dan 61 kursi untuk blok distrik. Maka telah dapat dipastikan bahwa calon dari LDP yang akan menjadi perdana menteri. Hal itu disebabkan oleh keputusan dari Majelis Rendah lebih kuat dan lebih mutlak dibanding Majelis Tinggi. Maka dari itu wakil dari LDP Yasuo Fukuda disahkan menjadi perdana menteri Jepang pada tanggal 26 September 2007 hinggasekarang.

BAB III

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI JEPANG

3.1. Sistem Pemilihan Umum Sebelum Perang Dunia II

Istilah "Sistem Pemilihan Umum" sudah sering didengar dan dibaca di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Tidak jarang pula dalam media massa, setiap hal yang berhubungan dengan pemilihan umum disebut sebagai "sistem pemilu", mulai dari hak pilih, penyelenggaraan pemilu dan berbagai hal lain.

Sesungguhnya, dalam khazanah ilmu politik, istilah "sistem pemilu" memiliki definisi yang lebih sempit dan ketat yakni : Sistem Pemilihan Umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya (1) pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan (2) suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi (http://id.wikipedia/Konsep_Pemilu).

Definisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum.

Sejak pengumuman konstitusi Jepang pada tanggal 11 februari 1889, Jepang memiliki sebuah sistem pemilihan nasional. Awalnya pemilihan sangat terbatas untuk sebagian kecil pria dewasa dan diadakan secara berangsur-angsur dan mencapai puncaknya pada pemungutan suara secara universal setelah berakhirnya perang dunia II.

Pemilihan umum pertama untuk anggota DPR diadakan pada tahun 1890, namun pemilihan dibatasi hanya untuk pria dewasa yang membayar pajak ¥ 15 atau lebih. Setelah tiga setengah dekade jumlah pemilih meningkat dari yang tadinya tidak mencapai 500,000 menjadi 3 juta orang. Dalam tahun 1900 pemberian suara dilakukan secara rahasia dan kualifikasi pajak diturunkan menjadi ¥ 10, dengan demikian hampir membuat jumlah pemilih hampir dua kali lipat.

Dalam tahun 1919 kualifikasi diturunkan sampai ¥ 3, kali ini jumlah pemilih menjadi lebih dari dua kali lipat. Kira-kira seperempat dari jumlah keluarga di Jepang pada saat itu mempunyai seorang anggota yang memiliki hak suara. Akhirnya dalam tahun 1925 kualifikasi pajak dihapuskan seluruhnya, dan semua pria dewasa diberi hak suara. Pada tahun 1925 Universal Manhood Suffrage Law memperluas jumlah pemilih menjadi 12 juta dengan mengakui hak suara untuk seluruh penduduk pria yang berusia 25 tahun atau lebih, meskipun demikian wanita tidak memiliki hak suara sampai Desember 1945.

Sebelum tahun 1945 kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sangat kecil. Anggota DPR dipilih, namun kursi pada House of Peer diisi melalui pengangkatan atau turun-temurun. Pemerintah daerah secara langsung dibawah oleh pemerintah pusat. Majelis lokal dipilih, namun gubernur ditunjuk oleh pemerintah nasional, sedangkan walikota ditunjuk oleh gubernur dari susunan nama-nama yang diajukan oleh majelis kota. Kepala desa dan walikota baik di desa atau kota dipilih oleh majelis lokal masing-masing. Dalam konstitusi tahun 1889 pemimpin-pemimpin Meiji membentuknya menjadi suatu majelis nasional yang sebagian dipilih, yang dimaksudkan agar memperoleh penghargaan

negara-negara Barat, memperkuat dukungan rakyat banyak, dan menjadi katup keamanan yang tidak berbahaya bagi perasaan yang tidak puas. Mereka telah mendahului pembaruan yang berani ini dengan berbagai percobaan setempat dalam badan-badan yang dipilih, mulai dengan majelis prefektur dalam tahun 1878, diikuti oleh majelis desa, kota, dan distrik kota besar dalam tahun 1880 dan kemudian majelis-majelis seluruh kota dalam tahun 1888. Majelis-majelis daerah demikian, seperti juga *Diet* nasional hanya mempunyai kekuasaan terbatas dan dipilih oleh kelompok pemilihan yang sangat terbatas. Hanya orang dewasa berusia lebih dari dua puluh lima tahun dan membayar pajak ¥ 15 atau lebih mempunyai hak suara dalam pemilihan-pemilihan *Diet*.

Dalam tahun 1890 jumlah ini merupakan 1,26 persen dari penduduk. Dengan menghitung anggota keluarga, maka ini hanya merupakan kira-kira 6 persen dari seluruh penduduk yang tergolong keluarga yang mempunyai hak suara. Anehnya ini kira-kira sama persentasenya dengan kelas *samurai* lama, walaupun kini kelompok-kelompok pemberi suara sebagian besar adalah para petani pemilik tanah dan usahawan, dan karena itu kebanyakan tidak berasal *samurai*.

Kekuasaan Majelis Perkilan yang dipilih rakyat dalam *Diet* juga dibatasi oleh Majelis Bangsawan, yang didasarkan atas Majelis Bangsawan Inggris dan diberi kedudukan yang sama dengan majelis rendah. Untuk Majelis Bangsawan, seperti telah kita lihat, pemerintah dalam tahun 1884 menciptakan kebangsawanan yang baru, terdiri dari bangsawan isatana lama, bekas tuan-tuan feodal, dan beberapa orang pemimpin yang baru. Tingkatan atas dari kebangsawanan ini semuanya adalah anggota Majelis Bangsawan, tetapi tiga tingkatan bawah

memilih sejumlah anggota yang teratas dari kalangan mereka, dan ditambah lagi dengan pengangkatan kaisar, kebanyakan dari kalangan sarjana, dan seorang anggota dipilih dari setiap prefektur oleh para pembayar pajak yang tertinggi. Badan yang terbentuk demikian jelas merupakan sarana pengawasan yang sangat konservatif atas setiap tindakan majelis rendah.

3.2. Sistem Pemilihan Umum Setelah Perang Dunia II

Jepang telah memiliki sebuah sistem pemilihan yang luas yang menggabungkan semua level pemerintahan sejak akhir Perang Dunia II. Dibawah ini peraturan pemilihan saat ini anggota setiap badan legislatif, termasuk majelis kota dan desa, dipilih melalui voting. Eksekutif politik, termasuk gubernur dan walikota atau kepala bagian lain dari pemerintahan lokal, juga dipilih melalui pemilihan. Perdana menteri yang dipilih oleh *Diet*, adalah satu-satunya eksekutif politik yang tidak dipilih melalui voting secara langsung.

Saat ini pemilihan untuk $\frac{1}{2}$ dari 252 anggota dewan diadakan setiap 3 tahun dalam sebuah gabungan nasional dan daerah. Dalam DPR, 511 anggota dipilih untuk masa 4 tahun, khusus dalam pemilihan yang dilakukan secara tidak beraturan setelah pembubaran majelis oleh kaisar atas permintaan perdana menteri. Pemilihan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali untuk kebanyakan badan eksekutif lokal dan badan-badan lainnya.

Dua badan legislatif nasional telah dipilih dalam daerah multimember, tetapi ukuran dari daerah / distrik-distrik ini berubah setiap waktu. Saat ini, 511 anggota DPR dan kira-kira $\frac{1}{3}$ dari 252 anggota dari majelis dewan dipilih dalam konstituensi multi anggota tidak seperti praktek di negara Eropa, dalam pemilihan DPR tidak ada perbandingan formula untuk alokasi jumlah kursi dalam distrik

multimember berdasarkan dari pembagian voting partai. Agaknya, pemenang diseleksi dari jumlah perolehan voting disetiap jumlah pemilih, dengan masing-masing pemilih memiliki satu suara. Namun, pada tahun 1983, sebuah sistem perwakilan diperkenalkan dalam pemilihan untuk 100 kursi untuk dewan perwakilan yang dipilih dalam basis nasional.

Dalam sebuah usaha untuk menciptakan kesamaan/keseimbangan perwakilan antara daerah-daerah untuk DPR, jumlah kursi *Diet* yang dialokasikan untuk setiap konstituensi ditetapkan pada populasi dasar. Pada awal pertumbuhan populasi di kota-kota di Jepang dan daerah pinggiran kota setelah tahun 1950, jumlah kursi dialokasikan pada konstituensi urban dan sub urban dan konstituensi-konstituensi baru dibentuk. Ini menyebabkan pertumbuhan secara menyeluruh pada majelis dari 466 kursi ditahun 1946 menjadi 511 kursi ditahun 1993. Di tahun 1991, jumlah masyarakat yang diwakilkan oleh anggota *Diet* tunggal pada daerah populasi yang besar (urban) masih tiga kali lebih besar dari jumlah yang diwakilkan oleh seotrang anggota *Diet* tunggal pada daerah populasi terkecil.

Sistem konstituensi ukuran menengah (*Chu Senkyoku Sei*), dimana setiap distrik mengirim perwakilan antara tiga dan lima pada majelis yang lebih rendah, telah dikritik sejak tahun 1970-an sebagai dasar dari korupsi dibidang politik. Sebagai respon dari kekacauan masyarakat karena adanya “politik uang “yang terus berlanjut, dibentuk kembali melalui pertimbangan yang serius bahwa akan diperkenalkan perwakilan yang proporsional dan daerah pemilihan yang lebih kecil kedalam pemilihan-pemilihan untuk DPR mulai diawal tahun 1990-an.

Sistem parlementer seperti yang ditetapkan dalam konstitusi tahun 1947 pada hakikatnya adalah penjelasan dan perbaikan sistem yang secara spontan

berkembang di Jepang pada tahun 1920-an. Dengan demikian mudah dipahami oleh semua orang Jepang dan berlangsung cukup efisien. Perubahan-perubahan yang pokok adalah untuk menjadikan *Diet* secara nyata sebagai “badan kekuasaan negara yang tertinggi” dan “satu-satunya badan pembuat undang-undang”, dan memberinya kekuasaan untuk memilih perdana menteri. Ia dipilih dari kalangan anggota *Diet*, khususnya oleh mejelis rendah badan itu dalam hal tidak dapat persetujuan majelis tinggi, dan selanjutnya ia memilih menteri-menteri kabinet dan pejabat-pejabat lain yang diangkat.

Majelis rendah *Diet* selalu berhak untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet; dalam hal ini perdana menteri harus turun atau kalau tidak membubarkan majelis rendah dan mengadakan pemilihan baru dan berusaha memperoleh dukungan mayoritas. Ini bukanlah bentuk demokrasi Amerika tetapi benar-benar sistem parlementer Inggris ; orang Jepang sejak tahun 1920-an tealh condong pada sistem ini.

Perubahan-perubahan penting lain sesudah perang dalam sistem parlementer adalah perluasan hak pilih pada semua wanita maupun pria di atas dua puluh tahun dan perubahan sifat majelis tinggi. Suatu Majelis Penasihat yang seluruhnya dipilih menggantikan bangsawan.pemilihannya berbeda dengan Majelis Perwakilan, dengan maksud agar pendukung atas para anggotanya tidak begitu sempit.

Seratus anggota Majelis Penasihat dipilih dari seluruh wilayah negara secara bebas, dan pada mulanya 150 anggota lain bertambah menjadi 152 anggota ketika Okinawa dikembalikan kepada Jepang, dipilih dari jumlah pemilih prefektur. Setengah dari masing-masing golongan dipilih tiap tiga tahun untuk

masa enam tahun. Tiap prefektur mempunyai paling sedikit dua kursi dalam jumlah pemilih prefektornya agar memiliki paling sedikit satu kursi dalam tiap pemilihan, dan prefektur yang lebih banyak penduduknya mempunyai kursi yang lebih banyak pula (Tokyo mempunyai delapan).

Selaku badan yang dipilih oleh rakyat, Majelis Penasihat tidak merupakan pengawas konservatif seperti peranan yang dilakukan oleh pendahulunya, dan kekuasaannya, bagaimanapun jelas tunduk pada Majelis Rendah. Pemilihan perdana menteri dilakukan oleh Majelis Perwakilan, anggaran belanja harus diajukan pertama-tama kepadanya, dan keputusan mengenai anggaran belanja menjadi berlakudalam tiga puluh hari. Sekalipun majelis tinggi tidak setuju namun tetap bersidang.

Ketentuan ini juga berlaku bagi pengesahan perjanjian-perjanjian. Untuk semua perundang-undangan diperlukan dua pertiga mayoritas dalam majelis rendah untuk membatalkan keputusan yang berupa penolakan Majelis Penasihat. Namun amandemen-amandemen terhadap konstitusi memerlukan dua pertiga suara dikedua majelis, tetapi sejauh ini tidak pernah dilakukan, seperti juga tidak pernah dilakukan terhadap konstitusi tahun 1889, sampai apa yang dinamakan amandemen tersebut mengubahnya menjadi konstitusi yang seluruhnya baru pada tahun 1947.

Dalam kebanyakan cara yang lain, *Diet* berfungsi hampir sama seperti pada tahun 1920-an, dan mendasarkan tindakannya baik pada contoh-contoh sebelum perang maupun sesudah perang. Seperti sebelumnya, Majelis Rendah dipilih untuk masa empat tahun, walaupun biasanya dibubarkan oleh perdana

menteri sebelum sampai masa empat tahun pada saat yang secara politis menguntungkan baginya atau bagi partainya.

Sistem pemilihan juga merupakan sistem luar biasa yang sama, yang ditetapkan dalam pembaruan *Diet* tahun 1925. Malah juga besarnya majelis rendah dalam tahun-tahun pertama sesudah perang sama-sama empat ratus enam puluh enam orang jumlahnya, ditetapkan pada tahun 1925.

Seperti sebelum perang, *Diet* tiap tahun memulai sidang dengan upacara pembukaan resmi pada bulan Desember, tetapi hampir segera sesudah langsung istirahat, karena liburan Tahun Baru, dan memulai kerjanya dengan sungguh-sungguh baru pada akhir Januari. Biasanya diselesaikan pembahasan anggaran belanja sebelum mulainya tahun fiskal pada bulan April praktek yang sangat berbeda dengan kongres Amerika yang biasanya baru berhasil memberikan suara terhadap anggaran belanja sampai tahun fiskal sudah hampir setengahnya lewat. Sidang “biasa” *Diet* harus dilakukan paling sedikit selama seratus lima puluh hari, yang mencakup sampai pada bulan Juni, tetapi biasanya diperpanjang sampai awal musim panas. Sidang-sidang “luar biasa” biasanya diadakan pada awal musim gugur untuk menyetujui anggaran belanja tambahan dan meninjau perundang-undangan darurat yang lalu. Lagi pula, bila majelis rendah dibubarkan oleh perdana menteri, harus diadakan pemilihan dalam waktu empat puluh hari sesudah itu untuk dapat memilih seorang perdana menteri.

Setelah Parlemen Jepang mengumumkan siapa yang akan menjadi perdana menteri Jepang yang baru maka setelah itu membentuk kabinet dan pimpinannya. Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya akan diresmikan dan dilantik oleh sang kaisar.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang memilih Perdana Menteri sebagai pemimpinnya dimana menggunakan suara mayoritasnya di majelis rendah untuk menyetujui beliau sebagai PM Jepang. Meski pihak oposisi menguasai majelis tinggi yang tidak mendukung Fukuda, namun majelis rendah secara konstitusional memegang pengaruh lebih besar.

Dibawah UU pemilu harus diadakan dalam 40 hari dari pembubaran Majelis Rendah, dan pemilihan untuk majelis lain diadakan dalam 30 hari dari masa jabatan anggota dewan. Walaupun jumlah tertentu diizinkan ketika *Diet* ada dalam sidang (UU Pemilu).

Waktu kampanye pemilihan yang legal ditentukan adalah 15 hari untuk pemilihan Majelis Rendah (termasuk pemilihannya) dan 18 hari untuk Majelis Tinggi. Periode-periode ini telah dipersingkat dari 30 hari oleh Undang-Undang pemilihan umum.

Kampanye pemilihan dilarang sebelum periode ini, walaupun aktivitas untuk "Menguji air" dan persiapan kampanye diizinkan. Bagaimanapun, ada batasan yang baik antara kampanye dan kegiatan politik yang umum, dan keadaan yang seperti ini belakangan tidak dapat dilarang.

Menurut penulis sendiri, sistem pemilihan umum di Jepang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemilihan-pemilihan umum yang banyak diadakan di negara-negara demokratis lainnya. Dimulai dari pembentukan partai-partai politik sebagai wadah masyarakat untuk ikut masuk kedalam sistem pemerintahan, kemudian pemilihan anggota majelis dan elemen-elemen pemerintahan lain sampai ketinggian yang rendah sekalipun adalah hal yang menarik dan mengundang rasa ingin tahu.

Seperti halnya pemilihan umum untuk Majelis Tinggi yang sebagian dari jumlah keseluruhannya adalah berasal dari kaum bangsawan dan kerabat kaisar atau sejenisnya yang diangkat dan ditetapkan untuk duduk dikursi Majelis Tinggi. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan konsep demokrasi dalam pemilu yang menjunjung tinggi suara rakyat sebagai daulat yang berbentuk kursi dalam pemilu, sehingga keadaan ini seperti sebuah “penghianatan” terhadap demokrasi dan rakyat. Akan tetapi keadaan ini mungkin sedikit terasa seimbang ketika ditetapkan bahwa keputusan dari Majelis Rendah yang keseluruhan anggotanya berasal dari pemilu adalah lebih kuat dan mutlak dari pada keputusan Majelis Tinggi.

Dari kondisi ini dapat diartikan bahwa anggota Majelis Tinggi yang diangkat dari kaum bangsawan dan kerabat kaisar adalah bukti dari loyalitas rakyat terhadap kaisar yang sangat mereka hormati, walaupun disisi lain mereka tetap berusaha menuju demokrasi yang sepenuhnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Jepang sebagai negara kerajaan yang dari awal pembentukan sistem pemerintahannya hingga memutuskan untuk menuju demokrasi telah mengalami perubahan-perubahan yang dianggap sebagai wujud perbaikan. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahannya yang pada awalnya adalah bentuk keotoriteran dari kaisar dan kerabat-kerabatnya, yang terlihat sangat jelas ketika Jepang mengalami zaman feodal, dimana masyarakat benar-benar merasa dirugikan dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menerima nasib saja.
2. Keadaan ini perlahan-lahan berubah hingga akhirnya masyarakat biasa sekalipun dapat ikut serta dalam pemerintahan yang tentunya setelah memenuhi syarat dan seleksi yang telah ditetapkan. Walaupun budaya turun-temurun sepertinya masih tetap menaungi Jepang, hal ini terlihat dari beberapa perdana menteri yang ternyata adalah keturunan petinggi-petinggi negara di masa lalu juga. Akan tetapi hal ini dirasa tetap baik karena mereka terpilih tentu karena mereka pantas untuk dipilih.
3. Sistem pemilihan umum di Jepang sendiri tidak banyak berubah semenjak negara ini mulai mengadakan pemilihan umum, hanya terjadi beberapa perubahan seperti wanita sudah memiliki hak suara setelah perang dunia II, jumlah pemilih yang telah bertambah banyak dan sepertinya sistem pemilihan umum semakin detail dalam proses pelaksanaannya, seperti

berkurangnya jumlah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan melainkan telah dipilih dalam pemilihan umum.

4.2. Saran

1. Dari ulasan diatas penulis menjadi lebih mengetahui bagaimana bangsa Jepang berusaha menjadi lebih baik setelah mereka diluluhlantakkan oleh perang. Penulis berharap semangat yang dimiliki oleh bangsa Jepang dapat dicontoh oleh negara mana pun termasuk Indonesia. Jepang juga menunjukkan bahwa sosialisasi dengan dunia luar dan pentingnya sebuah perdamaian yang harusnya juga dicontoh oleh bangsa-bangsa didunia, agar tidak terjadi lagi perang seperti perang dunia II yang kita harapkan adalah perang terakhir didunia ini.
2. Sistem pemilihan umum di Jepang adalah hal yang menarik karena mereka mempunyai seorang kaisar, dan mereka sudah demokratis, dengan proses kampanye yang terbilang lebih baik daripada Indonesia. Alangkah baiknya jika Indonesia yang demokratis dan tanpa seorang kaisar dapat melaksanakan pemilu lebih demokratis dan transparan, serta proses kampanye yang lebih efisien atau dengan kata lain bukan hanya untuk sekedar mengumpulkan massa pendukungnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Browles, G. 1983. *Japanese People*. Japan: Evergreen Course. Encyplodia.
- Danandjaja, James. 1977. *Foklor Jepang*. Jakarta: PT. Pustaka Grafika Utama.
- Fukutake, Tadashi. 1988. *Masyarakat Jepang Dewasa ini*. Jakarta : PT. Gramedia
- Gordon. 1993. *Postwar Japan As History*. California: University of California Press. Ltd.
- Harian. KOMPAS. 26 Desember 2007. Kabinet Pemerintahan Jepang
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_Jepang
- http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pemilu
- <http://id.wikipedia/Jepang>
- http://id.wikipedia/Konsep_Pemilu
- Ishida, Takeshi. 1989. *Democracy In Japan*. Japan : University Of Pittsburgh Press.
- Ishii, Ryosuke. 1988. *Sejarah Institusi Politik Jepang*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Journal OF Electrol Studie, 2 November 1999. Japan System of Election
- Jun ichi, Kyogoku. 1998. *The Political Dynamics Of Japan*. Tokyo: University Of Tokyo Press.
- Koenjatraningrat, 1976 . Yogyakarta: Universitas Gajahmada Mada.
- Koichi, Kishimoto. 1988. *Politics In Modern Japan*. Tokyo: Japan Echo Inc.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nurhayati, Yeti. 1987. *Modernisasi Jepang*. Jakarta: PT.Dian Rakyat.

- Ratna, Nyomankuta. 2004. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Reischauer, Edwin O. 1980. *The Japanese*. Tokyo: The Charles E. Tuttle
Company.
- Rich, Barnett. 1989. *The Guide Of Political*. Japan : Tokyo Press
- Suara Harian Merdeka, 5 Januari 2004. Mengadili PolitikusTercela.
- Suradjaja, I Ketut. 1984. *Pergerakan Demokrasi Jepang*. Jakarta : PT. Karya
Unipress.
- The International Society For Educational Information, Inc. 1989. *Jepang Dewasa
Ini*. Tokyo: International Society For Educational Information, inc.
- Yoshimoto, Inobu. 1965. *Forthy Year of Naikan*. Tokyo : Shunjuusha.

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah wadah demokrasi yang dilaksanakan dalam suatu negara yang berdaulat. Pemilu bertujuan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan dengan harapan mereka akan menyuarakan suara rakyat agar rakyat dapat hidup sejahtera. Pemilu di Jepang menjadi menarik untuk dibahas karena seperti kita ketahui Jepang adalah negara yang dipimpin oleh kaisar, sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh seorang perdana menteri.

Perang dunia II yang terjadi pada tahun 1945 memberi pengaruh yang sangat berarti pada Jepang sebagai pihak yang kalah. Perubahan itu juga terjadi dalam sistem pemilu Jepang.

Sistem pemerintahan Jepang yang diawali dengan sistem tradisional yang berpusat pada klan atau dikenal dengan sistem *tenno purba*, sistem ini berlaku sebelum terbentuknya negara Jepang purba di jaman Yamato (abad 8). Sistem ini semakin memudar karena kepala-kepala klan mengambil alih kekuasaan, hal ini terus berlanjut hingga pada abad 10 dan 11 terjadi perubahan. Pada saat itu, banyak tanah berangsur ditarik dari kekuasaan negara oleh pemilik-pemilik pribadi. Pemilik-pemilik tanah yang kerap terbebas dari beban pajak terus berkembang hingga membawa Jepang pada sebuah jaman yang disebut feodal (abad 12)

Pada jaman feodal ini, rakyat merasa sangat menderita karena sistem pajak yang ditetapkan oleh negara dirasa sangat memberatkan mereka. Para petani miskin banyak yang menjual tanahnya karena tidak sanggup membayar pajak. Sistem ini juga mengakibatkan pemerintah Jepang seperti terpisah-pisah, akan tetapi pada akhir abad 16 terjadi penggabungan daerah-daerah yang dianggap

kurang berhasil dalam membangun daerahnya. Akibatnya pada akhir abad 16 jepang bisa dikatakan telah bersatu kembali secara politis.

Pada akhir abad 16 keluarga tokugawa mulai berkuasa, Setelah menang dalam perang sekigahara, pada saat yang sama juga shogun dari klan tokugawa sangat berkuasa dalam pemerintahan. Berkembangnya agama kristen dianggap akan membahayakan, hingga dibuatlah politik isolasi (1639) dimana jepang menutup diri dari pengaruh dunia luar. Politik ini berlangsung lebih kurang 250 tahun. Politik isolasi ini berakhir seiring runtuhnya kekuasaan tokugawa.

Restorsi meiji (pertengahan abad 19) sebagai bentuk perubahan jepang telah membawa banyak perubahan antara lain dikembalikannya kekuasaan kepada kaisar dan telah dibukanya jepang untuk dunia luar.

Terbukanya jepang untuk dunia luar, sepertinya membuka mata jepang akan kemajuan bangsa eropa, tidak terlepas dengan dunia politik. jepang akhirnya memutuskan untuk membentuk pemerintahan jepang dengan sistem konstitusi seperti di Inggris. Dibentuklah parlemen dengan nama Kokkai (diet) yang terdiri dari majelis tinggi (sangi-in) atau disebut juga dengan dewan majelis atau house of councillors. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Setengah dari jumlah anggota dipilih setiap 3 tahun. Anggotanya diangkat dari kaum bangsawan dan kerabat kaisar. Majelis rendah (sungi-in) atau DPR / house of representatives. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Majelis rendah dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet (UUD Meiji 1889). Sedangkan kaisar hanyalah sebagai lambang negara dan bertugas meelantik perdana menteri dan kabinet, serta turut dalam ritual-ritual dalam keagamaan.

Pemerintahan Jepang dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih dari majelis tinggi dan rendah serta dibantu oleh para menteri dalam sebuah kabinet yang dipilih langsung oleh perdana menteri sendiri yang kebanyakan juga diambil dari majelis tinggi dan rendah.

Partai politik yang pertama di Jepang yaitu Aikoku Koto (perhimpunan patriot umum) berdiri pada tahun 1874, lalu berdiri partai-partai lainnya. Tetapi menjelang perang dunia II partai-partai tersebut bubar untuk sementara dan bangkit kembali pada tahun 1952. Beberapa partai besar Jepang adalah

1. partai Demokrat Liberal
2. partai Sosialis Jepang
3. partai Komeito
4. partai Demokrat Sosialis
5. partai Komunis Jepang
6. partai Demokratis Jepang

Sistem pemilu di Jepang sebelum perang dunia II pada awalnya sangat terbatas yaitu hanya pria dewasa yang membayar pajak sebesar ¥15 yang memiliki hak suara, yang pada saat itu (1890) hanya 1 % dari penduduk Jepang yang mempunyai hak suara.

Pada tahun 1925 kualifikasi pajak dihapuskan seluruhnya, dan semua pria yang berusia 25 tahun diberi hak suara, namun tidak demikian dengan wanita. Wanita baru memiliki hak suara pada Desember 1945. Sebelum tahun 1945 kesempatan untuk berpartisipasi di pemerintahan sangat kecil. Hal ini dikarenakan anggota DPR dipilih dalam pemilu tapi dewan majelis diangkat atau turun-temurun dan pemerintah daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Sistem pemilu Jepang setelah PD II, semakin detail dan menggabungkan semua level dan pemerintahan, seperti ; anggota legislatif termasuk majelis kota dan desa dipilih melalui voting. Gubernur dan walikota dan pemerintahan lokal lainnya juga dipilih. Hanya pemilihan perdana menteri yang dilakukan tidak melalui voting secara langsung.

Jumlah kursi diet diubah berdasarkan populasi dasar sehingga jumlah anggota diet berubah yaitu 466 di tahun 1946 menjadi 511 di tahun 1993. Perubahan penting lain adalah wanita telah mendapat hak suara pada pemilu dan perubahan sifat majelis tinggi. Majelis ini berubah menjadi majelis penasihat yang dipilih dari seluruh wilayah negara secara bebas, sistem pemilihannya berbeda dengan DPR agar anggotanya tidak begitu sempit. Pemilihannya berdasarkan jumlah prefektur, dan jumlah penduduk di tiap prefektur. Jumlah anggotanya 152 dan dari masing-masing golongan dipilih tiap tiga tahun untuk masa 6 tahun. Majelis penasihat tidak lagi sebagai pengawas konservatif seperti dewan majelis dan kekuasaannya tetap di bawah DPR.

Menurut penulis pemilihan umum di Jepang sangat menarik karena adanya kaisar, dan sedikit terasa lain dengan negara demokratis pada umumnya dimana pada konstitusi Jepang terdapat kelompok pemerintah yang berasal dari pengangkatan dan turun temurun. Tetapi menjadi seimbang karena kelompok tersebut harus tunduk dengan kelompok lain yang dipilih oleh rakyat. Ini membuktikan rasa saling menghargai di antara mereka sangat tinggi karena sadar akan fungsi dan peranannya masing-masing. Hal ini sebaiknya dicontoh oleh negara-negara lain agar terciptanya perdamaian dalam sebuah negara.

